

# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK



## **LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TRIWULAN IV TAHUN 2024**





**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak telah menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 Triwulan IV yang merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak untuk periode 1 (satu) triwulan yang penyusunannya mengacu pada Renstra Tahun 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dan rancangan awal akhir RKPD.

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada triwulan sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi pada tahap pelaksanaan. Tujuan penyusunan Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak ini adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dalam mengoperasionalkan RKPD 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.

Harapan kami semoga Evaluasi Hasil Renja ini dapat pula digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak terutama dalam pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Ngabang, 15 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Landak,



Samsul Bahri, S. Pd., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721007 199602 1 004



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**DAFTAR ISI**

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024.....	2
<b>BAB II      PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK DAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK .....</b>	5
<b>BAB III      HASIL CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 TRIWULAN IV.....</b>	33
<b>BAB IV      PENUTUP .....</b>	48
4.1 Faktor Pendorong.....	48
4.2 Faktor Penghambat .....	48
4.3 Kesimpulan .....	49



EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024

---

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Persandingan antara Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 .....	6
-----------	---	---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja SKPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauhmana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## **1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



## EVALUASI HASIL RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TRIWULAN IV TAHUN 2024

---

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Landak;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak, maka Evaluasi Hasil Renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam empat tahun tujuan dan sasaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak sebagai berikut.

### **1.2.1. Tujuan**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 disusun bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2023-2026. Adapun tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik”

### **1.2.2. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak tahun 2023-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Persentase pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;



EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024

---

- c. Meningkatkan Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan; dan
- d. Meningkatkan Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya





## **BAB II**

### **PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK DAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK**

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pada Bab ini menyandingkan antara Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Program/Kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ke perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja.

Berdasarkan hasil membandingkan data dan informasi pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 diketahui bahwa :

1. Sebanyak 6 (enam) Program dapat terakomodir dari 6 program di Rencana Strategis Tahun 2023-2026 (100 %), 12 Kegiatan dapat terakomodir dari 12 Kegiatan di Rencana Strategis Tahun 2023-2026, 39 Sub Kegiatan dapat terakomodir dari 46 Sub Kegiatan di Rencana Strategis Tahun 2023-2026.
2. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran tahun 2024 dan skala prioritas Kabupaten Landak. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1.



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

**Tabel 2.1**

**Persandingan antara Program/Kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak**

<b>RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK</b>				<b>RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK</b>			
<b>No .</b>	<b>(Kode) Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)</b>	<b>No.</b>	<b>(Kode) Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>		<b>Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</b>	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>		<b>Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD</b>
		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>			<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Perangkat Daerah				Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan administrasi Kepegawaian</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan administrasi Kepegawaian</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			-	-
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Kantor	Disediakan				Disediakan
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah</b>
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Lainnya					
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Operasional atau Lapangan					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
2	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>Jumlah Desa Berkarakter Pancasila</b>	2	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		<b>Jumlah Desa Berkarakter Pancasila</b>
		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun





**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-	-



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			-	-
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku</b>	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>		<b>Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku</b>
		<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik</b>



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		<b>Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>				<b>Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
--	--	---	--	--	--	---	--



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
--	--	---	---	--	--	---	---



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
--	--	---	---	--	--	---	---



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase Ormas dan LSM yang aktif</b>	4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>		<b>Persentase Ormas dan LSM yang aktif</b>





**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>		<b>Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya</b>	
		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	yang Disusun				
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Kepercayaan di Daerah					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			-	-
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>	<b>Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah</b>



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		<b>SOSIAL</b>					
		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun





**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Konflik di Daerah					
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
--	--	--	---	--	--	--	---



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
--	--	---	---	--	--	---	---



**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK  
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



**BAB III**  
**HASIL CAPAIAN KINERJA RENCANA KERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK TAHUN**  
**2024 TRIWULAN IV**

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 Triwulan IV, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada Lampiran 1 dengan sistematika sesuai Formulir E.81 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja sebesar 142,40% dan realisasi anggaran sebesar 99,60%.

Penjelasan capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.226.400,- terealisasi sebesar Rp 5.220.900,- atau 99,89%. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 dokumen terealisasi 2 dokumen (Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025).
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.079.600,- terealisasi sebesar Rp 5.068.000,- Namun Dokumen RKA sudah disusun. Indikator Jumlah Dokumen



RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 1 dokumen terealisasi 2 dokumen yaitu dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen RKA Tahun Anggaran 2025.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5,140,400,- terealisasi sebesar Rp 5.102.551,- atau 99,77%. Indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 1 Laporan terealisasi 5 Laporan yaitu Evaluasi Hasil Renja TW I, II, III, IV, dan LAKIP tahun 2024.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu anggaran sebesar Rp 1.941.489.751,- pada Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.912.419.944,- atau 94,30%. Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 14 orang realisasi 17 orang yang terdiri dari 15 Orang PNS dan 2 orang PPPK.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang memiliki indikator jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan Pagu anggaran sebesar Rp 77.186.321,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 76.101.824,- atau 98,59%. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target kinerja 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang memiliki indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5,554,800 pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 5.525.600 atau 99,47%. Indikator Jumlah



Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 Laporan realisasi 1 Laporan (dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023).

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu Rp 14,769,300.00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.428.890,- atau 97,70%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp 24.002.000,- terealisasi Rp 23.909.503,- atau 99,61%. Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 1 paket realisasi 1 Paket.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu anggaran sebesar Rp 22.260.600,- pada Triwulan IV terealisasi Rp 22.218.100,- atau 99,81%. Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket realisasi kinerja 1 paket.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 42.655.800,- sudah terealisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 42.652.305,- atau 99,99%. Indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 Paket realisasi 1 Paket.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 7.665.600,- kemudian pada perubahan anggaran menjadi Rp 0. Dilakukannya perubahan anggaran karena sudah tidak ada lagi surat kabar maupun koran/majalah yang dipesan/dibeli, dimana segala informasi dapat diperoleh melalui media



sosial sehingga tidak lagi menggunakan surat kabar maupun majalah. Anggaran pada sub kegiatan ini kemudian digeser ke pengadaan barang.

5. Penyediaan Bahan/Material dengan Pagu anggaran semula sebesar Rp 11,900,000.00 kemudian diubah pada Perubahan Anggaran menjadi 9.539.300,- pada Triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 9.451.560,- atau 99,08% Kegiatan ini akan dilaksanakan dibulan Oktober terkait dengan pelaksanaan perayaan HUT Pemda Kabupaten Landak yang ke-25.
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang memiliki indikator Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 145.888.493,- pada Triwulan IV sudah terealisasi sebesar Rp 145.883.000,- atau 100%. Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 77 Laporan realisasi 95 Laporan.
  7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran sebesar Rp 25.381.600,- kemudian diperubahan anggaran menjadi Rp. 32.455.200,- dengan realisasi sebesar Rp 32.019.060,- atau 98,66%. Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target 7 unit realisasi 7 unit.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Pagu anggaran sebesar Rp 7.762.500,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar





Rp 7.755.000,- atau 99,90 %. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 1 Laporan realisasi kinerja 1 laporan.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu anggaran sebesar Rp 43.370.600,- kemudian berubah menjadi Rp 36.401.600,- terealisasi sebesar Rp 31.985.941,- atau 87,87 %. Perubahan ini karena penyesuaian realisasi anggaran pemakaian yang tidak terserap sehingga digeser untuk pengadaan. Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 Laporan realisasi 1 laporan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 55.311.200,- sudah terealisasi sebesar Rp 52.791.348,- atau 95,44 %. Indikator Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala dengan target 11 unit realisasi 9 unit.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu anggaran sebesar Rp 7.234.300,- pada Triwulan III terealisasi Rp 7.154.000,- atau 98,89%. Indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 15 Unit Realisasi 8 Unit.

### **3. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka



Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 11.943.300,- pada Triwulan IV terealisasi Rp 11.864.750,- atau 99,34%. Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun target 1 Dokumen realisasi 1 dokumen.

- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,- pada Triwulan III sudah terealisasi 100%. Dengan indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun target 1 dokumen Hibah FPK.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Pagu anggaran sebesar Rp 797.999.300,- mengalami perubahan anggaran menjadi pada triwulan II realisasi sebesar Rp 702.458.119,- atau 98,29%. Kelompok belanja pada sub kegiatan ini adalah kegiatan Paskibra dari persiapan sampai pelaksanaannya. Pada triwulan 1 sudah dilaksanakan sosialisasi rekrutmen, rapat persiapan dan pelaksanaan seleksi. Selanjutnya pada triwulan III telah dilakukan diklat calon paskibraka terpilih serta pelaksanaan tugas paskibraka pada 17 agustus 2024. Adapun indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan target 74 orang realisasi 361 orang peserta. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah total peserta kegiatan Rapat Persiapan Seleksi Perekrutan Paskibraka, Kegiatan



Seleksi Paskibraka, Sosialisasi Persiapan Perekrutan Paskibraka, Kegiatan Rapat Evaluasi Panitia Seleksi Paskibraka.

- 4) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dengan Pagu anggaran sebesar Rp 32.940.418,- terealisasi sebesar Rp 32.431.120,- atau 98,45%.

#### **4. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 6.112.100,- dengan realisasi Rp 6.110.600,- atau 100%. Realisasi fisik 1 (satu) dokumen yaitu RKA bidang Politik Dalam Negeri.
  - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 31.694.796.502,- mengalami tambahan anggaran menjadi Rp 31.717.365.502,-



teralisasi sebesar Rp 31.717.363.217,- atau 100%. Anggaran pada sub kegiatan ini dialokasikan untuk Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (hibah KPU dan Bawaslu), Belanja Hibah kepada TNI POLRI dan Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun target 3 dokumen, realisasi 4 dokumen yaitu dokumen Hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik (9 Parpol), hibah KPU, hibah BAWASLU, hibah TNI POLRI dan hibah KODIM 1210 Landak.

- 3) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.270.000,- mengalami perubahan menjadi Rp 2.002.600,- terealisasi sebesar Rp 2.002.000,- atau 99,97%. Target Kinerja 100 orang realisasi 100 orang.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 34.163.700,- mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 77.121.835,- realisasi sebesar Rp 74.633.097,- atau 96,77%. Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah target 400 orang realisasi 400 orang atau 100%.

- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 18.753.100,- mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 640.800,- realisasikan Rp 637.300,- atau 99,45%. Perubahan anggaran karena tidak dapat direalisasikan sehingga dialihkan pada pelaksanaan koordinasi. Target kinerja 1 laporan realisasi 1 Laporan yang dibuat dalam 1 tahun.

## **5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 3.711.600,- realisasi Rp 3.706.100,- atau 99,85%. Target kinerja 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen (Dokumen Program Kerja bidang Ormas).
  - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan



Pagu anggaran sebesar Rp 3.820.400,- realisasi Rp 3.815.300,- atau 99,87%.

- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 98.452.000,- realisasi Rp 98.193.400,- atau 99,74%. Indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah target 70 orang relisasi 80 orang yaitu peserta kegiatan pembinaan ormas.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran 7.524.000,- realisasi sebesar Rp 7.522.400,- atau 99,98%.
- 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 6.145.546,- sampai pada triwulan III terealisasi sebesar Rp 6.140.400,- atau 99,92%.

## **6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan:
  - 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah dengan Pagu anggaran



sebesar Rp 10.740.000,- terealisasi sebesar Rp 10.458.800,- atau 97,38% Indikator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksaaan Fasilitas Pengurus FKUB Kabupaten).

- 2) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 230.000.000,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 230.000.000,- atau 100%. Alokasi anggaran ini adalah untuk hibah Forum Kerukunan Umat Beragama. Indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah target 260 orang terealisasi 35 orang (terdiri dari Anggota Kepengurusan, Dewan Penasehat dan personalia Sekretariat). Besarnya target karena dalam perencanaan akan mengadakan kegiatan sosialisasi narkoba, namun anggaran tidak dapat mengakomodirnya. Anggaran yang ada adalah untuk hibah FKUB.
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah merupakan tambahan sub kegiatan di perubahan anggaran dengan Pagu anggaran sebesar Rp 20.970.700,- realiasisasi sebesar Rp. 20.970.700 atau 100%.



## **7. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 5.652.100 sampai pada triwulan III terealisasi sebesar Rp 5.613.100,- atau 99,31%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun target 1 dokumen.
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 205.788.900,- terealisasi sebesar Rp 205.770.100,- atau 99,99%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun target 1 Dokumen.





- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 9.084.600,- pada Triwulan III sudah terealisasi sebesar Rp 8.710.134,- atau 95,88%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 80 orang realisasi 2 orang. Target kinerja dalam Renstra yang kemudian diturunkan dalam Rencana Kerja terlalu tinggi karena pada saat perencanaan Renstra, anggarannya besar. Namun ketika dipenganggaran KUA PPAS, anggarannya minim sehingga kemungkinan target kinerja tidak akan tercapai.
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp 38.500.600,- berubah menjadi Rp 59.211.300,- pada Triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp 58.898.400,- atau 99,47%. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah target 37 orang realisasi 50 orang (peserta rapat koordinasi penanganan



konflik sosial). Realisasi melebihi target sehingga capaiannya sangat baik.

- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang dengan pagu sebesar Rp 23.924.577,- reealisasi Rp 23.680.900,- atau 81,29%.
- 6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp 32.192.100,- terealisasi Rp 26.168.850,- atau 99,60%.

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV, yaitu:

1. Ada 2 Sub Kegiatan tambahan dalam APBD Perubahan yaitu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Anggaran Kesbangpol sebesar Rp 35.496.202.055,- kemudian terjadi Perubahan Anggaran sebesar Rp. 35.828.891.043,- yaitu terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 332.688 988,- dimana perubahan ini terjadi karena adanya Pokir Hibah FKDM dan tambahan lainnya.
3. Anggaran hibah lebih besar dibandingkan dengan anggaran operasional kantor. Total Belanja Hibah sebesar Rp. 32.020.719.402,- terealisasi 100%.

Hibah dimaksud yaitu:

- a. Hibah Bantuan Keuangan partai Politik sebesar Rp. 1.824.184.000
- b. Forum Koordinasi dan Komunikasi Masyarakat (FORKOMAS) sebesar Rp. 75.000.000
- c. Hibah Forum Pembauran Kebangsaan sebesar Rp. 50.000.000
- d. Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama sebesar Rp. 230.000.000



- e. Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebesar Rp. 200.000.000
  - f. Hibah KPU sebesar Rp. 19.570.180.362
  - g. Hibah BAWASLU sebesar Rp. 6.271.355.040
  - h. HIBAH KODIM 1210 LANDAK sebesar Rp. 1.000.000.000
  - i. HIBAH Polres Landak sebesar Rp. 3.000.000.000
3. Terdapat kekurangan anggaran pada pembayaran beban kerja TPP sebesar Rp 20.732.170,00 sehingga berdampak terpotongnya TPP bulan desember pada PNS Kesbangpol yang seharusnya dibayarkan 100%. Adapun penyebab yaitu kelalaian penganggaran tidak menghitung kembali saat perubahan anggaran.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 FAKTOR PENDORONG**

Berdasarkan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 Triwulan IV, maka ditemui faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendukung pencapaian target kinerja, meliputi:

1. Koordinasi yang baik antar bidang dengan membentuk jaringan perencanaan perbidang, sehingga bisa dilaksanakan dan direalisasikan oleh setiap bidang yang bersangkutan. Bagian Perencana dan Pelaporan hanya mengendalikan, mengevaluasi, dan meng approve secara by sistem.
2. Setiap bidang membantu dalam penyampaian data realisasi kinerja dengan cara jemput bola.
3. Bendahara cepat dalam memberikan realisasi keuangan kepada perencana sebagai bahan penyusunan evaluasi.

#### **4.2 FAKTOR PENGHAMBAT**

Beberapa Faktor penghambat dalam realisasi fisik dan anggaran yaitu:

1. Realisasi anggaran yang menggunakan Embiz Market tidak dapat 100% direalisasikan karena antara SSH dan harga di Embiz Market berbeda sehingga terdapat selisih.
2. SIPD belum bisa mengakomodir realisasi anggaran depenitif, sehingga bendahara harus melihat kertas kerja realisasi manual per sub kegiatan dan menggabungkannya dalam bentuk RFK.
3. Realisasi anggaran yang tercantum di SIPD sering terjadi selisih antara pencairan dan realisasi yang tertera.



#### 4.3 KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan berjalan dengan baik. Hasil tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja sebesar 142,40% dan realisasi anggaran sebesar 99,60%. Terdapat beberapa kendala terkait pembayaran TPP bulan Desember yang mengalami kekurangan anggaran sehingga tidak dapat dibayarkan 100% sesuai aturan yang berlaku. Semoga dengan adanya beberapa permasalahan di penganggaran tahun 2024 terkhusus untuk TPP dapat lebih teliti lagi penganggarannya ditahun 2025.

Demikian laporan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak Tahun 2024 Triwulan IV disusun, untuk memberi gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Untuk keberhasilan dan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka diterapkan koordinasi, kolaborasi dan inovasi dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.

Ngabang, 15 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Landak,



Samsul Bahri, S. Pd.,M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721007 199802 1 004

**LAMPIRAN I**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak**  
**Periode Pelaksanaan: 2024**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab						
							I		II		III		IV											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Rp11.252.293.369,00	98%	Rp2.218.119.748,00	98%	Rp 2.437.957.565	0%	Rp -	98%	Rp 1.304.986.192	0,00%	Rp 390.424.690	Rp 622.649.220	98%	Rp 2.318.060.102	196%	Rp 4.536.179.850	1,96%	40,31%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD, Renja-PD, RKA-SKPD, LAKIP-PD	13 Dokumen	Rp 188.664.000	4	Rp 26.303.780	3	Rp 15.446.400	0	Rp -	3	Rp 15.391.451	0	Rp -	Rp -	3	Rp 15.391.451	7	Rp 41.695.231	53,85%	22,10%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 64.332.000	1	Rp 15.954.380	1	Rp 5.226.400			1	Rp 5.220.900		0	0	1	Rp 5.220.900	2	Rp 21.175.280	40,00%	32,92%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp 62.166.000	2	Rp 4.426.900	1	Rp 5.079.600			1	Rp 5.068.000		0	0	1	Rp 5.068.000	3	Rp 9.494.900	75,00%	15,27%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 62.166.000	1	Rp 5.922.500	1	Rp 5.140.400			1	Rp 5.102.551		0	0	1	Rp 5.102.551	2	Rp 11.025.051	50,00%	17,73%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan	Rp 7.934.805.947	2	Rp 2.065.789.421	2	Rp 2.024.230.872	0	Rp -	2	Rp 1.128.032.699	0	Rp 310.345.008	Rp 474.042.237	2	Rp 1.912.419.944	4	Rp 3.978.209.365	50,00%	50,14%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	Rp 7.389.449.947	14	1.941.489.751,00	14	1.941.489.751			14	Rp 1.069.320.745		301.256.580	460.215.195	14	Rp 1.830.792.520	28	Rp 3.772.282.271	50,00%	51,05%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Rp 480.000.000	1	Rp 118.772.160	1	77.186.321,00			1	Rp 53.186.354		9.088.428	13.827.042	1	Rp 76.101.824	2	Rp 194.873.984	50,00%	40,60%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Rp 65.356.000	1	Rp 5.527.510	1	Rp 5.554.800			1	Rp 5.525.600		0	0	1	Rp 5.525.600	2	Rp 11.053.110	50,00%	16,91%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi Kepegawaian	8 Laporan	Rp 322.687.600	-	Rp -	Rp -	Rp 14.769.300		Rp -		Rp -		Rp -	Rp 14.428.890	0	Rp 14.428.890	0	Rp 14.428.890	0,00%	4,47%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	Rp 52.017.000	-	Rp -	-	1 Rp 14.769.300				Rp -		0	1 14.428.890	1	Rp 14.428.890	1	Rp 14.428.890	25,00%	27,74%		
		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	Rp 270.670.600	-	Rp -	-					Rp -				0	Rp -	-	0 Rp -	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Kegiatan	Rp 1.639.993.620	5	Rp 287.323.150	6	Rp 244.346.193	0	Rp -	4	Rp 117.358.868	0	Rp 60.548.085	Rp 66.207.515	4	Rp 244.114.468	9	Rp 531.437.618	37,50%	32,40%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 139.373.920	1	Rp 43.073.037	1	24.002.000,00			1	Rp 11.825.155			1	12.084.348	2	Rp 23.909.503	3	Rp 66.982.540	75,00%		48,06%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 121.231.000	2	Rp 35.052.500	1	22.260.600,00			1	Rp 7.053.300		6.178.200	1	8.986.600	2	Rp 22.218.100	4	Rp 57.270.600	100,00%		47,24%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 115.765.000	1	Rp 34.929.883	1	42.655.800,00			1	Rp 20.981.220		21.671.085		0	1	Rp 42.652.305	2	Rp 77.582.188	50,00%		67,02%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 38.477.700	1	Rp 11.738.400	1	-			0	Rp -		0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 11.738.400	25,00%	30,51%		
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Rp 85.146.000	0	Rp -	-	1 9.539.300,00			0	Rp -		0	1	9.451.560	1	Rp 9.451.560	1	Rp 9.451.560	25,00%		11,10%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342 Laporan	Rp 1.140.000.000	88	Rp 162.529.330	77	145.888.493,00			33	Rp 77.499.193	20	32.698.800	42	35.685.007	95	Rp 145.883.000	183	Rp 308.412.330	53,51%		27,05%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Rp 608.202.902	1	Rp 25.603.900	100%	Rp 32.455.200	0%	Rp -	100%	Rp 18.388.260	0%	Rp -	Rp 13.630.800	100%	Rp 32.019.060	200%	Rp 57.622.960	2,00%	9,47%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	Rp 608.202.902	6	Rp 25.603.900	7	32.455.200,00	0		7	Rp 18.388.260		0	0	13.630.800	7	Rp 32.019.060	13	Rp 57.622.960	46,43%		9,47%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Rp 273.984.900	100	Rp 7.770.000	100	Rp 44.164.100	0	Rp -	100	Rp 16.677.014	0%	Rp 5.638.960	Rp 17.424.967	100	Rp 39.740.941	200		200,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Rp 35.000.000	1	Rp 7.770.000	1	Rp 7.762.500			1	Rp 3.861.000	0	1.958.000	1.936.000	1	Rp 7.755.000	2	Rp 15.525.000	50,00%	44,36%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab												
					5			6		7		8		9			10		11			12		13 = 6 + 12		14 = 13x 100%							
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13x 100%		15									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	Rp	238.984.900	K	Rp	1	K	Rp	1	K	Rp	12.816.014	K	Rp	3.680.960	0	Rp	15.488.967	1	Rp	31.985.941	K	Rp						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	90	%	Rp	283.954.400	100	Rp	55.223.769	100	Rp	62.545.500	0	Rp	-	38	Rp	9.137.900	0	Rp	13.892.637		Rp	36.914.811	38	Rp	59.945.348	138	Rp	115.169.117	153,85%	40,56%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	46	Unit	Rp	224.009.000	11	Rp	48.118.769	11		55.311.200,00	0		7	Rp	7.283.900	0		11.492.637	2		34.014.811	9	Rp	52.791.348	20	Rp	100.910.117	43,48%	45,05%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66	Unit	Rp	59.945.400	15	Rp	7.105.000	15		7.234.300,00	0		3	Rp	1.854.000	0		2.400.000	5		2.900.000	8	Rp	7.154.000	23	Rp	14.259.000	34,85%	23,79%	
2.	Meningkatnya rasa aman dan tenteram	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Desa Berkarakter Pancasila	46	Desa	Rp	2.334.290.000	19	Rp	140.253.200	11	Rp	870.474.018	0	Rp	-	0	Rp	274.160.131	0	Rp	486.009.738	12	Rp	96.426.477	12	Rp	856.596.346	31	Rp	996.849.546	67,39%	43%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	Rp	2.334.290.000	1	Rp	140.253.200	100%	Rp	870.474.018	0%	Rp	-	50%	Rp	274.160.131		Rp	486.009.738	50%	Rp	96.426.477	100%	Rp	856.596.346	200%	Rp	996.849.546	2,00%	42,70%
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12	Dokumen	Rp	456.820.000	3	Rp	44.414.500	1		11.943.300			1	Rp	5.711.750	0		0		6.153.000	1	Rp	11.864.750	4	Rp	56.279.250	33,33%	12,32%		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4	Dokumen	Rp	267.240.000	1	Rp	67.802.250	1		50.000.000				Rp	-	1		50.000.000		0	1	Rp	50.000.000	2	Rp	117.802.250	50,00%	44,08%		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	Orang	Rp	833.970.000	0	Rp	-	74		775.590.300,00	361	Rp	268.448.381	0		434.009.738	363		59.842.357	724	Rp	762.300.476	724	Rp	762.300.476	289,60%	91,41%			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1930	Orang	Rp	514.210.000	0	Rp	-													0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	Laporan	Rp	22.000.000	0	Rp	-													0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	0,00%			
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	250	Keluarga	Rp	240.050.000	50	Rp	28.036.450	60		32.940.418,00		0	Rp	-	0		2.000.000	50		30.431.120	50	Rp	32.431.120	100	Rp	60.467.570	40,00%	25,19%		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik penerima bantuan keuangan partai politik dengan kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Kriteria yang berlaku	100	%	Rp	74.338.607.000	100	Rp	19.315.874.688	100%	Rp	31.803.242.837	0	Rp	-	100	Rp	27.118.497.402	0,00	Rp	4.092.601.000	0	Rp	589.647.812	100	Rp	31.800.746.214	200	Rp	51.116.620.902	200,00%	68,76%
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	400	%	Rp	74.338.607.000	2,96	Rp	19.315.874.688	100%	Rp	31.803.242.837	0,00%	Rp	-	0,54%	Rp	27.118.497.402	0%	Rp	4.092.601.000	100%	Rp	589.647.812	100,54%	Rp	31.800.746.214	4	Rp	51.116.620.902	0,99%	68,76%
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3	Dokumen	Rp	82.000.000			1	Rp	6.112.100						0		0		6.110.600	1	Rp	6.110.600	1	Rp	6.110.600	33,33%	7,45%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab										
							I		II		III		IV															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11	Dokumen	Rp	73.288.307.000			3	31.717.365.502,00		Rp	-	3	Rp27.118.497.402	0	Rp 4.091.176.000	5	507.689.815	8	Rp 31.717.363.217	8	Rp31.717.363.217	72,73%	43,28%		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang	Rp	72.800.000	700	Rp 146.913.950	100	2.002.600,00		Rp	-		1.425.000	100	577.000	100	Rp 2.002.000	800	Rp 148.915.950	800,00%	204,55%				
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.020	Orang	Rp	754.500.000	300	Rp 82.021.570	400	77.121.835,00					400	74.633.097	400	Rp 74.633.097	700	Rp 156.654.667	68,63%	20,76%					
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	Laporan	Rp	141.000.000	1	Rp 35.064.900	1	640.800,00				1	637.300	1	Rp 637.300	2	Rp 35.702.200	50,00%	25,32%						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas dan LSM yang aktif	97,40	%	Rp	2.028.699.820	97	Rp 52.466.805	97%	Rp 119.652.346	0	Rp	-		Rp 2.110.400	100	Rp 117.267.200	100	Rp 119.377.600	197	Rp 171.844.405	202,26%	8,47%				
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	%	Rp	2.028.699.820	75,758	Rp 52.466.805	100	Rp 119.652.346	0%	Rp	-	0	Rp	-	1,16	Rp 2.110.400	125	Rp 117.267.200	126,16	Rp 119.377.600	202	Rp 171.844.405	201,92%	8,47%	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	7.000.000			1	Rp 3.711.600						1	3.706.100	1	Rp 3.706.100								
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	10.082.000			1	Rp 3.820.400						1	3.815.300	1	Rp 3.815.300								
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	260	Orang	Rp	1.587.500.000	50	41.285.105	70	98.450.800,00						80	98.193.400	80	Rp 98.193.400	130	Rp 139.478.505	50,00%	8,79%				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55	orang	Rp	348.076.420	15	Rp 5.481.700	15	7.524.000,00						15	7.522.400	15	Rp 7.522.400	15	Rp 13.004.100	27,27%	3,74%				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	Laporan	Rp	76.041.400	1	Rp 5.700.000	1	6.145.546,00				1	2.110.400	0	4.030.000	1	Rp 6.140.400	1	Rp 11.840.400	25,00%	15,57%				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya	100		Rp	1.093.430.000	100	Rp 52.481.300	100%	Rp 261.710.700	0,00	Rp	-	0	Rp 236.674.600		Rp -	100%	Rp 24.754.900	1	Rp 261.429.500	101	Rp 313.910.800	101,00%	28,71%		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase cakupan keberhasilan kegiatan terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	760	Orang	Rp	1.093.430.000		Rp 52.481.300	100	Rp 261.710.700	0%	Rp	-	0	Rp 236.674.600	0	Rp -	100	Rp 24.754.900	100	Rp 261.429.500						



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab								
							I				II				III				IV															
							8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%																					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	22.000.000	1	Rp	1.700.800	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	0	0	Rp	-	1	Rp	1.700.800	25,00%	7,73%							
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	145.680.000	0	Rp	-	1	Rp	10.740.000		1	Rp	6.674.600	0		0		3.784.200	1	Rp	10.458.800	1	Rp	10.458.800	25,00%	7,18%				
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1080	Orang	Rp	388.680.000	0	Rp	-	260	Rp	230.000.000			35	Rp	230.000.000	0		0		0	35	Rp	230.000.000	35	Rp	230.000.000	3,24%	59,17%			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	550	Orang	Rp	515.370.000	115	Rp	50.780.500	37		20.970.700,00					50		20.970.700	50	Rp	20.970.700	165	Rp	71.751.200	30,00%	13,92%						
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Laporan	Rp	21.700.000	0	Rp	-								0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	0,00%						
		PROGRAM PENERKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase realisasi kinerja Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik daerah	100	%	Rp	2.198.057.391	100	Rp	68.979.250	100%	Rp	335.853.577	0	Rp	-	0	Rp	36.050.200		Rp	12.541.900	100	Rp	280.249.384	100	Rp	328.841.484	200	Rp	397.820.734	200%	18,10%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase cakupan keberhasilan terkait kebijakan teknis dan pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100	%	Rp	2.198.057.391	119,47	Rp	68.979.250	100	Rp	335.853.577	0%	Rp	-	46,27	Rp	36.050.200	1,49	Rp	12.541.900	66,67	Rp	280.249.384	114,43	Rp	328.841.484	234	Rp	397.820.734	233,90%	18,10%	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	46.000.000	0	Rp	-	1	Rp	5.652.100				1		3.187.500	0		2.425.600	1	Rp	5.613.100	1	Rp	5.613.100	25,00%	12,20%				
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	Dokumen	Rp	49.000.000	0	Rp	-	1		205.788.900,00				1		2.389.800	0		203.380.300	1	Rp	205.770.100	1	Rp	205.770.100	25,00%	419,94%				
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	330	Orang	Rp	300.530.000	92	Rp	14.435.000	80	Rp	9.084.600			2	Rp	2.940.000	0		2.588.800	77		3.181.334	79	Rp	8.710.134	171	Rp	23.145.134	51,82%	7,70%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168	Orang	Rp	661.027.391	40	Rp	49.044.250	37		59.211.300,00			50	Rp	28.416.200	0		4.375.800	37		26.106.400	87	Rp	58.898.400	127	Rp	107.942.650	75,60%	16,33%		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelengkapan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48	Laporan	Rp	131.500.000	0	Rp	-	12	Rp	23.924.577			10	Rp	4.694.000	0		0	0	18.986.900	10	Rp	23.680.900	10	Rp	23.680.900	20,83%	18,01%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab					
								I	II		III	IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen Rp 1.010.000.000	3	Rp 5.500.000	3	Rp 32.192.100,00	K	Rp	-	K	Rp	-	K	Rp	3	Rp 26.168.850,00	6	Rp 31.668.850	50,00%	3,14%		
6 PROGRAM												P													
12 KEGIATAN				Total Target dan Realisasi Anggaran				Rp35.828.891.043,00					Rp0,00		Rp28.970.368.525		Rp 4.971.291.388		Rp 1.267.009.379		Rp35.685.051.246,00				
46 SUB KEGIATAN								Rata-rata Capaian Kinerja (%)				0,00%	0,00%	45,58%	80,9%	1,46%	13,91%	95,31%	4,83%	142,40%	99,60%				
								Predikat Kinerja				SR	SR	SR	T	SR	SR	SR	SR	SR	T				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
1. tidak semua sub kegiatan dapat terakomodir, sehingga kinerja sub kegiatan tidak dapat teralisasi dengan baik.																									
2. Anggaran yang minim sehingga pengalokasian anggaran difokuskan pada sub kegiatan yang dianggap prioritas.																									
3. Realisasi anggaran tidak dapat 100% dilakukan karena antara SSH dan harga di Embiz Market berbeda.																									
4. Kesulitan untuk mendapatkan realisasi keuangan karena menggunakan cara manual, yaitu mengumpulkan kartu kendali anggaran perbidang. Namun tidak semua bidang mempunyai catatan realisasi sehingga Pelaporan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024 terlambat dilakukan.																									
5. SIPD belum bisa mengakomodir realisasi anggaran depenitif, sehingga harus melihat realisasi per sub kegiatan dengan menggunakan akun PPK.																									
6. Realisasi anggaran yang tercantum di SIPD sering terjadi selisih antara pencairan dan realisasi yang tertera.																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) :																									



Disusun  
Ngabang, 15 Januari 2025  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Landak,  
  
SAMSUL BAHRI, S. Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721007 199602 1 004

Dievaluasi  
Ngabang,        Januari 2025  
Plt. Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Landak,

YULIANUS EDO NATALAGA, S.Hut, M.Sc  
Pembina  
NIP. 198207042006041010

Lampiran I : REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD  
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor :  
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak  
Triwulan : 4 (empat)

### REKAP LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRIWULAN KE 4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN 2024

NO REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	Sumber Dana (DAU/DAK/ BANKEU)	Pagu Dana (Rp.)	NILAI KONTRAK (Rp)	Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Masa Pelaksanaan Pekerjaan sesuai kontrak (hari)	BA Serah Terima Nomor dan Tanggal	Realisa si Fisik (%)	REALISASI KEUANGAN		Hambatan/ kendala dan solusi	Output		KET.
						Tanggal mulai dan tanggal selesai			(Rp.)	( % )		Satuan	Vol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14
	BELANJA DAERAH	DAU	35.828.891.043,00	-	-	-	-	-	35.685.051.246,00	99,60%				
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAU	2.437.957.565,00	-	-	-	-	-	2.318.060.102,00	95,08%				
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	15.446.400,00	-	-	-	-	-	15.391.451,00	99,64%				
8.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	5.226.400,00	-	-	-	-	-	5.220.900,00	99,89%				
8.01.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DAU	5.079.600,00						5.068.000,00	99,77%				
8.01.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	5.140.400,00						5.102.551,00	99,26%				
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DAU	2.024.230.872,00	-	-	-	-	-	1.912.419.944,00	94,48%				
8.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	1.941.489.751,00						1.830.792.520,00	94,30%				
8.01.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	77.186.321,00						76.101.824,00	98,59%				
8.01.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	5.554.800,00						5.525.600,00	99,47%				
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DAU	14.769.300,00	-	-	-	-	-	14.428.890,00	97,70%				
8.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	14.769.300,00						14.428.890,00	97,70%				
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU	244.346.193,00	-	-	-	-	-	244.114.468,00	99,91%				
8.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	24.002.000,00						23.909.503,00	99,61%				
8.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	22.260.600,00						22.218.100,00	99,81%				
8.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	42.655.800,00						42.652.305,00	99,99%				
8.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	DAU	-						-	0,00%				
8.01.01.2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	DAU	9.539.300,00						9.451.560,00	99,08%				

8.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	145.888.493,00						145.883.000,00	100,00%				
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU	32.455.200,00	-	-	-	-	-	32.019.060,00	98,66%				
8.01.01.2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	32.455.200,00						32.019.060,00	98,66%				
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	44.164.100,00	-	-	-	-	-	39.740.941,00	89,98%				
8.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	7.762.500,00						7.755.000,00	99,90%				
8.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	36.401.600,00						31.985.941,00	87,87%				
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	62.545.500,00	-	-	-	-	-	59.945.348,00	95,84%				
8.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	55.311.200,00						52.791.348,00	95,44%				
8.01.01.2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	7.234.300,00						7.154.000,00	98,89%				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	DAU	870.474.018,00	-	-	-	-	-	856.596.346,00	98,41%				
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	DAU	870.474.018,00	-	-	-	-	-	856.596.346,00	98,41%				
8.01.02.2.01.00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	DAU	11.943.300,00						11.864.750,00	99,34%				
8.01.02.2.01.00 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	DAU	50.000.000,00						50.000.000,00	100,00%				
8.01.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	DAU	775.590.300,00						762.300.476,00	98,29%				
8.01.02.2.01.00 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	DAU	32.940.418,00						32.431.120,00	98,45%				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	DAU	31.803.242.837,00	-	-	-	-	-	31.800.746.214,00	99,99%				



8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	DAU	31.803.242.837,00	-	-	-	-	-	31.800.746.214,00	99,99%				
8.01.03.2.01.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	DAU	6.112.100,00						6.110.600,00	99,98%				
8.01.03.2.01.00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	DAU	31.717.365.502,00						31.717.363.217,00	100,00%				
8.01.03.2.01.00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	DAU	2.002.600,00						2.002.000,00	99,97%				
8.01.03.2.01.00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	DAU	77.121.835,00						74.633.097,00	96,77%				
8.01.03.2.01.00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	DAU	640.800,00						637.300,00	99,45%				
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	DAU	119.652.346,00	-	-	-	-	-	119.377.600,00	99,77%				
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	DAU	119.652.346,00	-	-	-	-	-	119.377.600,00	99,77%				
8.01.04.2.01.00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	DAU	3.711.600,00						3.706.100,00	99,85%				
8.01.04.2.01.00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	DAU	3.820.400,00						3.815.300,00	99,87%				

8.01.04.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	DAU	98.450.800,00						98.193.400,00	99,74%				
8.01.04.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	DAU	7.524.000,00						7.522.400,00	99,98%				
8.01.04.2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	DAU	6.145.546,00						6.140.400,00	99,92%				
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	DAU	261.710.700,00	-	-	-	-	-	261.429.500,00	99,89%				
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	DAU	261.710.700,00	-	-	-	-	-	261.429.500,00	99,89%				
8.01.05.2.01.00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	DAU	10.740.000,00						10.458.800,00	97,38%				
8.01.05.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	DAU	230.000.000,00						230.000.000,00	100,00%				
8.01.05.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	DAU	20.970.700,00						20.970.700,00	100,00%				
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	DAU	335.853.577,00	-	-	-	-	-	328.841.484,00	97,91%				
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	DAU	335.853.577,00	-	-	-	-	-	328.841.484,00	97,91%				
8.01.06.2.01.00 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	DAU	5.652.100,00						5.613.100,00	99,31%				

8.01.06.2.01.00 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	DAU	205.788.900,00						205.770.100,00	99,99%				
8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	DAU	9.084.600,00						8.710.134,00	95,88%				
8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	DAU	59.211.300,00						58.898.400,00	99,47%				
8.01.06.2.01.00 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	DAU	23.924.577,00						23.680.900,00	98,98%				
8.01.06.2.01.00 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	DAU	32.192.100,00						26.168.850,00	81,29%				
Jumlah			35.828.891.043,00						35.685.051.246,00	99,60%				

Neabang, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Landak



SAMSUJI BAHRI, S. Pd., M. Si  
NIP. 1907 199802 1 004